

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang sudah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan vaksinasi di DKI Jakarta dilihat dari perspektif teori dari William N Dunn dengan 6 teori yaitu kebijakan mulai dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah berjalan dengan baik, pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah DKI Jakarta juga sudah optimal mulai dari sebelum ditetapkan nya kebijakan vaksin oleh pemerintah pusat, pemerintah DKI Jakarta sudah membuat Instruksi Gubernur tentang persiapan penyelenggaraan vaksinasi covid-19 di DKI Jakarta dengan menginstruksikan 17 instansi pada tanggal 18 Desember 2020 kemudian mengeluarkan instruksi sekretaris daerah nomor 38 tahun 2021 tentang percepatan pelaksanaan kegiatan vaksinasi lansia, hal ini dilakukan Pemda DKI Jakarta untuk mempercepat vaksinasi, kemudian dengan konsep smart city DKI Jakarta juga memudahkan masyarakat dalam mengakses sentra vaksin dengan sistem JAKI (Jakarta Kini) yang dimana masyarakat dapat mendaftarkan diri untuk vaksin di aplikasi tersebut, selain itu Dinas Kesehatan DKI Jakarta juga mempunyai semangat kolaborasi antar instansi maupun swasta dalam mempercepat kebijakan vaksinasi kepada masyarakat.

Meski dalam penerapan kebijakan yang dilakukan di DKI Jakarta mengalami beberapa kendala seperti yang dijelaskan oleh informan dari Dinas Kesehatan bahwa kendala yang mereka alami adalah ada 3, yang pertama adalah masyarakat, kedua sistem dan ketiga adalah data kependudukan, tapi meskipun dengan kendala yang ada tidak menjadi halangan bagi Dinas Kesehatan untuk terus melakukan perbaikan atau menjadikan bahan untuk menjadi lebih baik hal ini dilakukan dengan terus berkoordinasi dengan tim teknis data, sekretaris daerah dan data kependudukan melalui Dukcapil.

Selain itu proses sosialisasi terus di lakukan untuk mencapai hal yang maksimal, Dinas Kesehatan juga bekerjasama dengan RW di DKI Jakarta untuk bisa sosialisasi secara langsung kepada masyarakat melalui dasawisma, selain itu Dinkes juga selalu sosialisas menggunakan media sosial seperti Instagram,

Twitter maupun website Dinas Kesehatan, dan dalam penggunaan anggaran DKI Jakarta sendiri didukung dengan APBN dan juga APBD, sumber dana untuk pembelian vaksin semua berasal dari APBN dan APBD digunakan untuk insentif tenaga kesehatan yang menjadi vasilikator vaksinasi covid-19.

5.2 Saran

1. Susun strategi komunikasi yang mempertimbangkan keragaman kebutuhan informasi masyarakat sebelum, saat, dan sesudah pengenalan vaksin, terutama yang berkaitan dengan keamanan, efektifitas, dan pemerataan distribusi vaksin.
2. Lanjutkan penyampaian pesan dan implementasi kebijakan pendukung secara optimal terkait langkah-langkah pencegahan COVID-19, seperti menggunakan masker, mencuci tangan, dan melakukan pembatasan sosial dan menyosialisasikan ke masyarakat sebagai bagian dari norma sosial.
3. Terapkan upaya persiapan vaksin COVID-19 secara maksimal, termasuk menyesuaikan langkah-langkah Komunikasi Risiko dan Pemberdayaan Masyarakat (KRPM).
4. Temukan cara menjangkau masyarakat yang akses informasinya paling terbatas, seperti pada masyarakat yang tergolong miskin dan rentan.
5. Jadikan rasa percaya sebagai elemen utama dalam setiap kebijakan public terkait pengembangan dan pengenalan vaksin COVID-19 makin transparan, makin baik.